



KOMUNIKASI POLITIK LINTAS PARTAI DALAM MEMAJUKAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Dramaturgis Pada Anggota DPRD Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya)

Gerad Kosamah¹, Lely Arrianie², Made Wilantara³

¹Prodi Magister Ilmu Komunikasi, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Magister Ilmu Komunikasi, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Magister Ilmu Komunikasi, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email : 2022010361002@pascajayabaya.ac.id

Article History:

Received: 15-07-2024

Revised: 03-08-2024

Accepted: 12-08-2024

Keywords: Political communication, ideas, political parties, development

Abstract: *This research aims to determine the political communication carried out by cross-political parties in Maybrat Regency in advancing regional development and the ideas developed for regional development of Maybrat Regency, Southwest Papua Province using Dramaturgical theory from Goffman (1959) Front Stage and Back Stage (Black Stage) as. The descriptive qualitative research method and research results show that on the front stage politicians always develop cross-party political communication to encourage regional development, especially at working meetings with regional governments, commission meetings and plenary meetings. Meanwhile, on the back stage, politicians are lobbying between factions, both through internal and external meetings at each faction whose parties are accommodated in the Maybrat Regency DPRD, including with the LMS and traditional leaders to capture the aspirations of the community. The conclusion of the research is that Dramaturgical theory from Irvan Goffman about front stage and back stage has been applied in cross-party communication to advance the development of the Maybrat region. Researchers suggest that factions in the DPRD continue to build cross-party communication as well as communication with various community components such as NGOs, traditional leaders, community leaders and youth leaders so that the development carried out is truly in line with community needs.*

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu bangsa akan ditentukan politik dan di dalam politik itu terdapat partai politik yang ikut alam memberi perubahan serta kemajuan bangsa. Partai politik ada landasan untuk yang menciptakan suatu peradaban besar bagi suatu bangsa. Berdirinya partai politik yang gagas oleh para pendiri dengan hal – hal yang mendasar seperti, Visi dan misi partai, angaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang mengatur setiap

kinerja partai. Partai diri untuk ikut dalam melakukan sebuah terobosan baru dalam meningkatkan pembangunan dinegara ini.

Komunikasi politik merupakan esensi dari politik yang menjadi satu bagian dimana setiap partai politik akan memangang tegus pada prinsip – prinsip komunikasi sehingga setiap kader partai wajib mengetahuinya dan menjalankan dalam setiap aktivitas partai. Komunikasi politik sangat peneting harus dibangun dari internal partai yang satu ke partai yang lain agar membangun sinergisitas dan kerja sama untuk melakukan semua inovasi baru setiap daerah.

Di kabupaten Maybrat dari awal pemekaran sampai sekarang ini banyak sekali masalah komunikasi yang dibangun dan dijalani oleh lintas partai politik seperti beberapa parti politik saja yang memiliki kursi di lembang DPRD, Komunikasi lintas partai politik, praktek yang gunakan oleh pimpinan partai politik, sumber daya manusia, masalah sering terjadi lintas kader partai, peran pimpinan partai dalam memberikan edukasi terhadap kader partai dan konsolidasi kurang efektif. Dari semua masalah inilah membuat pembangunan di kabupaten Maybrat tidak berjalan efektif.

Dalam periode 2019 - 2024 ada beberapa partai politik yang mendominasi kursi di DPRD kabupaten Maybrat Provisini Papua Barat Daya seperti Partai Golongan Karya (GOLKAR) 4 kursi, Partai Demokrat 4 kursi, Partai Nasional Demokrasi (NASDEM) 3 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 3 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 3 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 2 kursi dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1 kursi semua jumlah total 20 kursi .

Dari hasil pra observasi dan wawancara pra penelitian peneliti dari salah seorang di DPRD kabupaten Maybrat dia mangatakan : “ kami kadang – kadang satu sama lain tidak menemukan pola komunikasi politik yang bisa mempertemukan gagasan dan kepentingan masing – masing partai ketika berada dipanggung depan meskipun dipanggung belakang kami saling bersahabat satu sama yang lainnya boleh jadi karena kepentingan kami berbeda mengenai aspek – aspek pembangunan didaerah ini, penting bagi aspek tertentu, namun tidak penting bagi partai politik yang lain demikian juga sebaliknya “. (Pra observasi politisi PDIP DPRD Kabupaten September 2023)

Asumsinya hal inilah yang menyebabkan kerja sama antar partai politik tidak berjalan sebagaimana mestinya padahal kabupaten Maybrat membutuhkan banyak pembangunan baik fisik maupun pembangunan diluar fisik seperti Pendidikan, Kesehatan, kesejahteraan social termasuk pengembangan budaya dan peningkatan perekonomian rakyat. Semua program harus menjadi pekerjaan bagi para anggota DPRD Maybrat dan dikomunikasikan dengan pemerintah daerah sehingga dalam rapat kerja dengan pemerintah daerah para anggota dewan dapat menjalan fungsi sesuai dengan tugas pokoknya sebagai wakil rakyat yaitu dalam hal regulasi anggaran dan pengawasan.

Dalam hal legislasi misalnya anggota DPRD dan pemerintah daerah harus mampu melahirkan regulasi dalam bentuk perda misalnya berikatan dengan peningkatan kesejahateran rakyat dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan daerah peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga didik atau penyediaan modal usuha bagi masyarakat didaerah yang semuanya bisa ditentukan dengan penetapan anggaran sekaligus pengawasan terhadap kebijakan yang diambil olah pemerintah daerah. Namun karena komunikasi lintas partai sekali mengalami hambatan, maka dalam mengkomunikasikan dengan lintas partai sering kali juga terhambat.

Sehingga hal ini juga menjadi masalah dalam lintas partai karena kurangnya membangun kerja sama hubungan baik dengan kader lain dan ini memang ini akan menjadi sebuah ancaman untuk pimpinan partai politik untuk periode berikutnya. Pola

atau konsep ini jika tidak hindari atau diakhiri, maka akan menjadi masalah yang menghambat dalam pembangunan di kabupaten Maybrat karena yang pastinya bagi partai yang tidak mendapatkan bagian di legislatif akan menjadi oposi dan tidak memberikan pikiran kontribusi dalam pembangunan. Serta masalah ini juga akan membuat setiap pimpinan lintas partai tidak saling bersatu masing - masing bejalan dengan kelompoknya. Bagaiman membangun sebuah bangsa sedangkan pemuda dalam lintas partai politik tidak bersatu.

Sejauh ini menurut data peneliti dalam pra peneliti jumpai bahwa masalah komunikasi lintas partai politik sering terjadi gejala sayang besar atara lintas partai tidak saling bersatu, sering beradu opini di medai saling serang sehingga ini memang masalah serius yang terjadi harus diselesaikan.

Menurut hasil pra penelitian kami masalah komunikasi lintas partai politik karena ada faktor iri hati, cemburu yang berkepanjangan. Faktor cemburu lahir karena diantara partai tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam kursi legislatif 2019 -2024. Cara - cara komunikasi yang kurang berikan yang kadang menghambat pembangunan di kabupaten Maybrat. Serta masalah komunikasi lintas parta ini terjadi karena kurangnya edukasi dari pimpinan partai terhadap kader - kader partai serta untuk semua publik bagaimana cara berpolitik yang etika dan menjaga etika komunikasi di dalam lintas partai ini. Selain dari pada itu masalah komunkasi lintas partai politik ini karena sumber daya manusia yang mempuni dalam lintas partai politik sehingga ada masalah - masalah sedikit selalu saling serang dengan komunikasi yang kurang etika. Dan memang sumber daya manusia di barbagi partai politik di kabupaten Maybrat di hitung beberapa orang saja yang bisa mampu dan yang tidak mampu terlalu kemampuannya karena pola pendidikan partai yang kurang direalisasikan dengan baik. Komunikasi lintas partai ini akan berdampak kepada masyarakat untuk mendapatkan pambungan yang layak serta kabupaten Maybrat akan menjadi daerah yang konflik masalah komunikasi antara lintas partai nomor urut satu di Provinsi Papua Barat Daya.

Berdasarkan hasil kajian dari aliansi mahasiswa Maybrat tahun 2019 lalu dan hasil pra observasi saya bahwa komunikasi lintas partai politik di kabupaten Maybrat sekarang mengalami masalah karena semua pimpinan lintas partai politik tidak memberikan edukasi atau pendidikan terhadap setiap kader yang berada di kabupaten Maybrat agar tetap menjaga konsintesi dari pada komunikasi yang efektif. Dan memang yang membuat masalah komunikasi lintas partai adalah kader dari setiap partai. Pratek setiap pimpinan partai se Kabupaten Maybrat memang sangat salah dalam menerapkan konsep berpolitik yang beritregrasi serta bermartabat bagi semua masyarakat maumpun sesama pengurus lintas partai. Ada praktet egoisme, margaisme dan distrikisme ini sekarang manjadi pemicu masalah atau akar masalah dalam komunikasi lintas partai politik bahkan konsep atau praktek yang gunanakan oleh pimpianan lintas partai se kabupaten Maybrat sistem tidak saling percaya atau sistem individual dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Masalah ini terjadi karena ada keterkaitan dengan sumber daya manusia yang terbatas agar sehingga konsep yang di implementasikan dalam tugas dan tanggung jawabnya selalu ada masalah komunikasi yang jumpai dalam lintas partai politik. Karena kurang kesadaran setiap pimpinan partai dan seluruh kadernya tidak dalam menerapkan komunikasi yang etika dalam tugasnya. Serta masalah ini merupakan masalah serius yang akan menghambat pembangunan di kabupaten Maybrat sejauh ini. pembangunan infrastruktus, ekonomi,-pendidikan, kesehatan dan lain - lain tidak berjalan baik kerena para pelaku dalam sebuah kebijakan. Kebijakan berjalan norml ketika pola komunikasi yang bangun oleh pimpinan lintas partai saling berkomitmen dalam satu konsep.

Sudah 14 tahun kabupaten Maybrat di mekarkan sebagai pemerintah yang absolute setapi sentuhan dari pemerintah dalam pembangunan sejauh ini mencapai 50% karena semua kader - kader partai yang mendominasi di lembaga legislatif tidak mengarahkan kebijakan untuk masyarakat karena semua DPRD tidak bersatu dalam satu komunikasi yang baik.

Selain itu juga peran pemimpin partai politik untuk mengkampanyekan kepada semua publik bagaimana cara untuk membangun kedadaran bersama melalui komunikasi yang efektif. Karena semua masyarakat di Kabupaten Maybrat dari dulu hingga sekarang ini belum memahami pola atau konsep komunikasi yang baik dan benar didalam berdemokasi yang selama ini di jalankan sesuai hasil pengamatan dari peneliti. Pada akhir - akhir ini komunikasi lintas partai memulai saling serang dengan antara sesama lintas partai politik. Karena persaingan untuk menuju pileg 2024 mendatang sangat ketat dan akhir - akhir ini juga dalam pembangunan tidak berjalan lancar. masing partai dengan pengurusnya memulai melakukan konsolidasi dengan menggunakan pola komunikasi yang saling memprovokasi masyarakat sehingga masyarakat Maybrat hari ini tidak saling bersatu dalam membangun kabupatennya sendiri.

Harapan dari penelitian ini agar menjadi edukasi positif untuk setiap politisi atau setiap kader partai agar lebih giat lagi untuk membangun komunikasi politik lintas partai yang lebih erat dan memberikan dampak positif untuk pembanguan diwilayah

LANDASAN TEORI

Teori defusi inovasi merupakan teori yang paling sering dikutip dan diterapkan dari semua teori komunikasi yang lain dikemukakan oleh Everett M Roger (1983) . Proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui cara tertentu saluran dari waktu ke waktu diantara anggota suatu sistem sosial. Ini merupakan tipe khusus komunikasi dimana pesannya berkaitan den/gan ide – ide baru. Teori Proses pertukaran yang mengatur perilaku manusia dengan melandasi hubungan antar individu maupun antar kelompok menjadi focus perhatian bagi Blau, karena menggambarkan empat langkah pertukaran antar pribadi ke struktur social hingga ke perubahan social. Asumsi Peter Blau Dalam buku Komunikasi Politik Lely Arrianie (2022: 88), serta Teori Dramaturgis - Erving goffman Dramaturgi berasal dari bahasa Inggris yaitu “dramaturgy”, dari kata “drama” yang berarti seni atau teknik drama dalam bentuk teater. Menurut Goffman (1959).

METODE PENELITIAN.

Dalam penilitian ini peneliti kualitatif deskriptif, Subjek pada penelitian yaitu orang yang memiliki *product knowledge* dan memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi. benar serta terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti. Sedang Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dan Teknik analisis data dengan melakukan penyusunan data hasil penelitian dengan sistematis. Sedangkan Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pedoman pada 4 kriteria : (1) Derajat Kepercayaan (*credibility*); (2) Keteralihan (*Transferbility*); (3) Kebergantungan (*Dependability*) dan; (4) Kepastian (*Comfermability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi politik lintas partai politik di Kabupaten Maybrat dalam memajukan pembangunan daerah.

Setiap partai dalam fraksi memiliki kemampuan dalam komunikasi politik untuk membangun arah politik yang positif dan mencapai tujuan mereka. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, perlu adanya perencanaan yang matang dalam menentukan arah dan tujuan tersebut. Komunikasi politik sendiri merupakan proses perencanaan yang melibatkan konsep, gagasan, dan ide-ide yang bertujuan untuk mencapai hasil optimal serta membangun citra di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan dan data dari wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maybrat periode 2019–2024 menggunakan komunikasi politik untuk memajukan pembangunan daerah. Informan pertama, Ignasius Baru, yang juga merupakan Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi PDIP Kabupaten Maybrat serta anggota DPRD Kabupaten Maybrat, mengungkapkan bahwa komunikasi politik yang dibangun, baik di internal fraksi PDIP maupun antar fraksi, bertujuan untuk menciptakan sinergisitas dalam menghasilkan keputusan bersama yang memajukan pembangunan daerah.

Peneliti mengkonfirmasi pernyataan tersebut dengan teori Dramaturgis dari Goffman (1959), yang memaparkan konsep Panggung Depan (Front Stage) dan Panggung Belakang (Back Stage). Penelitian ini menunjukkan bahwa fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Maybrat telah memenuhi unsur-unsur inti dari teori tersebut. Dalam lembaga legislatif Kabupaten Maybrat, sering terjadi dinamika yang dimainkan oleh para aktor DPRD dalam komunikasi politik, yang pada akhirnya berdampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pada Panggung Depan, seperti yang dinyatakan dalam wawancara, komunikasi politik dibangun antar fraksi untuk menciptakan sinergisitas demi menghasilkan keputusan yang memajukan pembangunan daerah. Sementara itu, pada Panggung Belakang, komunikasi politik melibatkan lobi-lobi antar fraksi untuk mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan, seperti dalam pembangunan jalan dari Kampung Maan ke Kampung Pitor yang telah disahkan dalam sidang APBD 2019/2020.

Informan kedua, Sebastian Bame, juga mengungkapkan hal serupa, bahwa anggota DPRD Kabupaten Maybrat selalu membangun dialog dan diskusi dengan semua fraksi untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Ketika terjadi dinamika yang menghambat, mereka akan melakukan lobi-lobi untuk menyatukan persepsi antar fraksi demi mendukung kebutuhan masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati bahwa komunikasi intens antar anggota DPRD, baik dalam sidang maupun rapat, selalu dilakukan untuk menyatukan persepsi bersama demi mendorong kebijakan yang dibutuhkan masyarakat. Diskusi dan dialog ini dilakukan secara kontinu untuk membangun hubungan yang lebih baik di dalam lembaga legislatif.

Selama ini, diskusi dan dialog antarfraksi di DPRD Kabupaten Maybrat dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai kesepakatan dan mendorong kebijakan yang memajukan daerah. Dalam sidang-sidang APBD, meskipun terjadi dinamika berbeda, diskusi tetap berlangsung demi merumuskan kebijakan yang relevan bagi masyarakat. Lobby-lobby antarfraksi sering dilakukan untuk menyatukan kepentingan dan menghasilkan keputusan dalam sidang umum. Observasi menunjukkan bahwa fraksi Demokrat sering menjadi tempat berkumpul untuk membahas infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

Peneliti mengkonfirmasi pernyataan informan melalui teori Dramaturgis Goffman tentang panggung depan dan belakang. Di panggung depan, komunikasi politik antarfraksi

berlangsung lancar, dengan diskusi yang intensif untuk mendorong kebijakan. Di panggung belakang, lobby-lobby dilakukan untuk menyatukan pendapat antarpartai. Komunikasi politik ini mendukung legislasi, budgeting, dan pengawasan DPRD, serta sinkronisasi dengan Bupati demi memenuhi aspirasi masyarakat. Namun, di Kabupaten Maybrat sering terjadi kendala komunikasi antara legislatif dan eksekutif, yang mengakibatkan tidak terealisasinya beberapa program yang telah dibahas DPRD.

Informan keenam, Kaka Jufri Kambuaya, menyatakan bahwa sejak 2020, lima fraksi DPRD Kabupaten Maybrat telah berhasil membangun komunikasi politik untuk menetapkan pembangunan gedung dan infrastruktur. Diskusi yang dilakukan selama sidang telah menghasilkan banyak keberhasilan. Peneliti mengonfirmasi bahwa komunikasi dan diskusi di DPRD berjalan lancar, dengan anggota yang memiliki latar belakang aktivis, dan adanya lobi-lobi antar fraksi untuk menyatukan persepsi dalam sidang.

Informan ketujuh, Kaka Korneles Fatemyo, menambahkan bahwa komunikasi politik di DPRD melibatkan fraksi dan lintas fraksi, baik di dalam maupun di luar kantor, dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peneliti mencatat bahwa komunikasi lintas fraksi sangat kuat, dengan perdebatan panjang di sidang diakhiri dengan lobi-lobi untuk mencapai kesepakatan.

Informan kedelapan, Kaka Korneles Septinus Naa, mengungkapkan bahwa komunikasi politik efektif untuk mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Maybrat, dengan pembangunan infrastruktur yang terasa. Peneliti menemukan bahwa diskusi terbuka dan lobi antar fraksi di DPRD mendukung visi Bupati, dengan partai PDIP yang aktif berkomunikasi lintas partai untuk menyusun program sesuai visi dan misi Bupati.

Gagasan apa yang dikembangkan oleh partai politik melalui komunikasi politik lintas partai.

Gagasan pembangunan di Kabupaten Maybrat harus dikembangkan melalui komunikasi politik lintas partai dan anggota DPRD. Gagasan tersebut menjadi inti dari setiap pembangunan, dan untuk mencapainya, diperlukan interaksi dan pertukaran pesan antar partai melalui DPRD Kabupaten Maybrat. Biasanya, partai politik melalui fraksi-fraksinya akan merumuskan gagasan berdasarkan evaluasi masalah-masalah yang terjadi, dan kemudian merancang solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Teori Dramaturgis Goffman tentang Panggung Depan dan Panggung Belakang relevan dalam konteks ini. Gagasan yang dikembangkan DPRD Kabupaten Maybrat sebagai hasil dari komunikasi politik merupakan ide-ide baru yang menekan pada konsep pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, demi kepentingan masyarakat. Menurut Ignasius Baru, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi PDIP Kabupaten Maybrat sekaligus anggota DPRD periode 2019-2024, DPRD memiliki banyak program pembangunan yang direncanakan, namun terkendala oleh masalah anggaran serta fokus politisi pada pemilihan umum.

Peneliti mengonfirmasi bahwa dinamika yang terjadi di DPRD Kabupaten Maybrat sesuai dengan teori Goffman, di mana komunikasi politik di panggung depan ditandai dengan diskusi tentang program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, di panggung belakang, terdapat hambatan besar, terutama terkait anggaran daerah yang terbatas, yang mempengaruhi kelanjutan pembangunan.

Selain itu, situasi politik menjelang pemilu serentak 2024 menjadi hambatan lain. Banyak politisi sibuk dengan persiapan pemilu, yang mengakibatkan terhambatnya pengembangan gagasan pembangunan daerah. Setelah pemilu, akan diperlukan lobi-lobi

dan evaluasi untuk memastikan kelanjutan program pembangunan yang sudah direncanakan.

Pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung menyebabkan banyak politisi sibuk melakukan lobi untuk mendapatkan dukungan, seperti rekomendasi partai politik, anggaran, dan dukungan masyarakat. Peneliti mengamati bahwa banyak politisi berkegiatan di Jakarta untuk melakukan lobi tersebut, sehingga aktivitas pemerintahan kemungkinan baru akan berjalan lancar setelah pemilihan serentak.

Sebastian Bame menyatakan bahwa setelah pemilihan, akan diadakan rapat dan diskusi dengan anggota DPRD untuk mengevaluasi program-program yang belum terealisasi, terutama di bidang infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Namun, hambatan keuangan daerah dan kesibukan politisi dengan Pilkada dapat membuat komunikasi menjadi tidak efektif.

Peneliti mengonfirmasi bahwa pernyataan ini sesuai dengan teori Dramaturgis Goffman, di mana pada panggung depan DPRD mengadakan rapat evaluasi dan diskusi tentang program infrastruktur yang belum selesai. Namun, di panggung belakang, masalah keuangan dan kesibukan dengan Pilkada menjadi hambatan utama. Observasi peneliti juga menunjukkan bahwa kondisi keuangan Kabupaten Maybrat yang terbatas mengakibatkan pembangunan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Selain itu, peneliti mengamati bahwa saat ini banyak politisi sibuk dengan pemilihan legislatif dan persiapan Pilkada, sehingga komunikasi lintas partai atau fraksi menjadi terhambat. Politisi lebih fokus pada konsolidasi dan lobi untuk memenangkan calon yang mereka dukung. Setelah pemilu dan pelantikan DPRD serta Bupati, diharapkan komunikasi lintas partai akan kembali efektif dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam kaitannya dengan teori Goffman, terlihat bahwa di panggung depan fraksi Demokrat melakukan rapat untuk menyusun aspirasi masyarakat yang akan didorong dalam sidang APBD setelah pemilu. Namun, di panggung belakang, lobi-lobi lintas fraksi dilakukan untuk memastikan program-program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, bisa berjalan sesuai anggaran.

Peneliti juga mengamati bahwa rapat evaluasi fraksi-fraksi di DPRD dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan program pembangunan setiap tahun. Dalam rapat tersebut, dibahas juga program yang belum terealisasi, seperti pembangunan jalan dan jembatan, untuk diusulkan pada tahun berikutnya. Namun, di panggung belakang, keterlambatan pembangunan sering terjadi karena anggaran yang kecil dan kebutuhan dana yang besar untuk pemilu, sehingga program pembangunan dilakukan secara bertahap.

Nando Salosa menambahkan bahwa semua fraksi di DPRD harus membangun komunikasi untuk menyatukan program-program prioritas yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan akses jalan, jembatan, puskesmas, pendidikan, dan ekonomi.

Setelah peneliti mengkonfirmasi informasi yang disampaikan dengan teori Dramaturgis dari Goffman, terlihat bahwa fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maybrat telah memenuhi unsur inti dari teori tersebut. Pada panggung depan, pembangunan di Kabupaten Maybrat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek pemerataan di empat wilayah besar, yakni Aifat, Ayamuru, Aitinyo, dan Yumasesss, serta anggaran yang terbatas. Keterbatasan anggaran ini menjadi faktor penghambat bagi pengembangan gagasan-gagasan yang diajukan oleh anggota DPRD Kabupaten Maybrat.

Di panggung belakang, semua anggota DPRD melakukan identifikasi masalah secara menyeluruh dan merumuskan hasil identifikasi tersebut dalam sidang-sidang mendatang. Komunikasi lintas fraksi juga dilakukan untuk mendorong program-program pembangunan yang prioritas. Jufri Kambuaya menyatakan bahwa untuk mengembangkan gagasan pembangunan daerah, DPRD selalu melakukan komunikasi politik lintas fraksi dalam agenda pengawasan. Evaluasi dan kritik terhadap dinas terkait dilakukan untuk memastikan program yang belum terlaksana dapat dilanjutkan dan diawasi dalam sidang-sidang DPRD berikutnya.

Namun, pengamatan lapangan menunjukkan bahwa rapat evaluasi yang dilakukan oleh DPRD bersama kepala dinas dan Bupati bertujuan untuk meninjau kembali program-program yang belum terlaksana. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar untuk kritik dan saran yang disampaikan kepada dinas terkait. Selain itu, komunikasi lintas fraksi dilakukan untuk memastikan gagasan-gagasan pembangunan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan, meski terhambat oleh keterbatasan anggaran daerah yang rendah. Hambatan anggaran ini juga menyebabkan program-program yang seharusnya dilaksanakan pada tahun sebelumnya terpaksa ditunda.

Kondisi pemilu serentak 2024 menjadi faktor tambahan yang menghambat proses komunikasi dan pengembangan gagasan pembangunan daerah. Anggaran daerah difokuskan untuk pembiayaan pemilu, sehingga banyak program pembangunan yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini juga disebabkan oleh politisi yang sibuk dengan aktivitas pemilu, seperti konsolidasi, lobi-lobi partai, dan lobi anggaran untuk memenangkan calon Bupati. Sehingga, komunikasi antarfraksi dalam mendorong program prioritas menjadi tidak efektif.

Partai PDIP, misalnya, melakukan komunikasi dengan partai-partai lain untuk berdiskusi dan memberikan tanggung jawab kepada anggotanya dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Namun, hasil pengamatan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tahun 2024 tidak maksimal karena anggaran difokuskan pada pemilu serentak. Semua program yang tertunda akan dilanjutkan pada anggaran 2025, dengan prioritas pada kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan komunikasi politik lintas partai dalam memajukan pembangunan daerah di Kabupaten Maybrat, dengan mencocokkan hasilnya berdasarkan teori Difusi Inovasi dan teori Dramaturgis dari Goffman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi lintas partai di DPRD Kabupaten Maybrat telah mengikuti perspektif teori Dramaturgis, di mana pada panggung depan, anggota DPRD melakukan diskusi dalam berbagai kegiatan sidang, dan di panggung belakang, fraksi-fraksi melakukan lobi untuk menyatukan persepsi dalam mendukung program-program yang akan disahkan.

Namun, pembangunan di Kabupaten Maybrat terhambat oleh rendahnya anggaran belanja daerah, sehingga pembangunan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat. Analisis dengan teori Difusi Inovasi menunjukkan bahwa meskipun politisi di Kabupaten Maybrat telah melakukan langkah-langkah seperti kesadaran, minat, evaluasi, dan uji coba, langkah "adopsi" belum sepenuhnya terealisasi, terutama dalam upaya menaikkan anggaran belanja daerah.

Penelitian ini juga membandingkan hasilnya dengan penelitian lain yang menekankan pada akuntabilitas politik dan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan. Namun, fokus penelitian ini lebih pada komunikasi politik lintas partai dan gagasan yang dikembangkan oleh DPRD Kabupaten Maybrat. Kesimpulannya, komunikasi politik yang matang dan terstruktur sangat penting untuk mengatasi hambatan

seperti rendahnya anggaran dan pemilu serentak, serta untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Teori Dramaturgis dan Difusi Inovasi dapat menjadi pedoman dalam upaya ini.

KESIMPULAN.

Komunikasi lintas partai dan gagasan pembangunan daerah di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barta Daya telah mengikuti perspektif panggung depan dan panggung belakang dari teori Erving Goffman antara lain :

1. Pada panggung depan komunikasi lintas partai melalui rapat kerja, rapat komisi dan rapat paripurna di DPRD untuk memajukan pembangunan daerah Kabupaten Maybrat. Sedangkan di panggung belakang di lakukan pertemuan pertemuan internal dan eksternal maupun lobby antar lintas partai termasuk pertemuan dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan LSM.
2. Gagasan pembangunan yang dikembangkan dikomunikasikan di panggung depan menetapkan anggaran pembangunan daerah di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan di panggung belakang komunikasi lintas partai lebih diformulasikan untuk menjaring aspirasi masyarakat tentang pembangunan di Kabupaten Maybrat baik melalui sidang maupun melalui dialog dengan masyarakat

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Arrianie, Lely (2022) Teori, Metode, Perspektif Media dan Komunikasi Politik Kompas
- [2] Arrianie, Lely (2020) KOMUNIKASI POLITIK. Dramaturgis, Pencitraan Politisi dan Panggung Politik.
- [3] Bungin (2017) METOLOGI PENELITIAN KUALITATIF.
- [4] AKTUALISASI METODELOGIS KEA RAH RAGAM VARIAN KONTERPORER
- [5] Mulyana Deddy (2022) METOLOGI PENELITIAN KUALITATIF.
- [6] Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya
- [7] Rusmiart Ariningrum (2015). Nalisis Difusi Inovasi Dan Pengembangan Budaya Kerja Pada Organisasi Birokrasi.
<https://media.neliti.com/media/publications/233782>